

Transformasi Pelayanan Publik Perikanan Berbasis Digital melalui Aplikasi E-rebon: Perspektif *Agile Governance* di Kabupaten Sidoarjo

Elly Nur Khayati^{1*}; Vidya Imanuari Pertiwi²

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa timur, Surabaya, Indonesia
ellynurkhayati98@gmail.com

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa timur, Surabaya, Indonesia
vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital mendorong instansi pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah aplikasi E-rebon yang digunakan untuk mempermudah proses administrasi dan pelayanan bagi nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *agile governance* dalam pelayanan digital melalui aplikasi E-rebon di Desa Gisik Cemandi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada enam prinsip *agile governance* yang dikemukakan oleh Luna, Krutchén, & Moura (2015) yaitu, *Good enough Governance, Business Driven, Human Focused, Based On Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach*, serta *Simple Design and Continuous Refinement*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *agile governance* pada aplikasi E-rebon telah berjalan cukup baik. Aplikasi E-rebon mampu meningkatkan kemudahan akses layanan, mempercepat proses administrasi, dan mendukung efektivitas pelayanan kepada nelayan. Meskipun demikian, implementasi pelayanan digital masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat nelayan, kondisi jaringan internet yang belum stabil, serta faktor cuaca yang memengaruhi aktivitas pengguna aplikasi. **Kata kunci :** *Agile Governance, E-rebon, Inovasi Pelayanan Publik, Pelayanan Digital, Transformasi Digital*

ABSTRACT

Digital transformation encourages public institutions to develop services that are more efficient, responsive, and accessible. One of the innovations developed by the Fisheries Service of Sidoarjo Regency is the E-Rebon application, which facilitates administrative processes and public services for fishermen. This study aims to analyze the implementation of Agile Governance in digital public services through the E-Rebon application in Gisik Cemandi Village, Sidoarjo Regency. This research employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation techniques. The analysis was based on six Agile Governance principles proposed by Luna, Krutchén, and Moura, namely *Good Enough Governance, Business Driven, Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, and Simple Design and Continuous Refinement*. The findings indicate that Agile Governance has been implemented relatively well in the E-Rebon application. The system has improved service accessibility, accelerated administrative procedures, and enhanced service effectiveness for fishermen. However, several challenges remain, including limited digital literacy among users, unstable internet connectivity, and environmental conditions affecting application usage. Therefore, continuous user assistance, infrastructure improvement, and system refinement are necessary to optimize digital fisheries services.

Keywords : *Agile Governance, Digital Public Service, Digital Transformation, E-rebon, Service Innovation*

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Eprilianto *et al.*, 2025). Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pelayanan dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat (Rahmadany, 2024). Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mendorong berbagai instansi pemerintah untuk mengembangkan inovasi pelayanan digital guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi perikanan cukup besar. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2025, jumlah nelayan yang terdaftar mencapai 853 orang dan sebagian besar berada di Kecamatan Sedati.

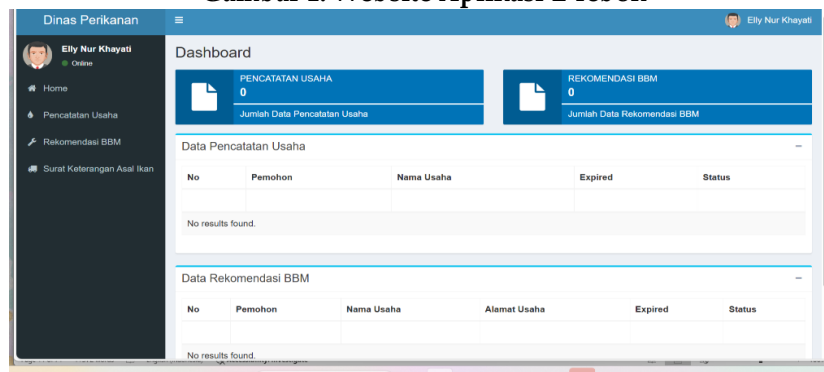
Tabel 1. Data Persebaran Nelayan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Nelayan
Sedati	527
Sidoarjo	87
Jabon	80
Waru	48
Tanggulangin	45
Porong	31
Candi	19
Buduran	11
Tulangan	2
Tarik	1
Wonoayu	1
Gedangan	1
Total	853

Sumber: Dinas Perikanan (2025)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mengembangkan aplikasi E-rebon pada tahun 2021 sebagai media pelayanan digital bagi masyarakat nelayan (Agustin *et al.*, 2023). Aplikasi ini digunakan untuk mendukung berbagai hasil tangkapan, pengurusan dokumen perikanan, dan pelayanan lainnya secara elektronik.

Gambar 1. Website Aplikasi E-rebon



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Meskipun aplikasi E-rebon telah diimplementasikan sejak tahun 2021, jumlah pengguna aktif masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan jumlah nelayan yang terdaftar. Dari total 853 nelayan, hanya 487 nelayan yang tercatat menggunakan aplikasi E-rebon. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diterima oleh seluruh kelompok nelayan.

Tabel 2. Pengguna Aplikasi E-rebon Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Pengguna
2022	77
2023	284
2024	59
2025	67
Total	487

Sumber: Dinas Perikanan (2025)

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, rendahnya pemanfaatan aplikasi dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital nelayan serta kondisi jaringan internet yang belum stabil di wilayah pesisir. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian nelayan masih memilih menggunakan prosedur administrasi secara manual. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *agile governance* telah banyak diterapkan dalam berbagai layanan publik berbasis digital seperti pelayanan kepegawaian, perpajakan, dan administrasi kependudukan. Namun demikian, kajian mengenai penerapan *agile governance* pada sektor perikanan masih terbatas, khususnya yang berfokus pada pemanfaatan aplikasi digital oleh nelayan di wilayah pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut melalui analisis penerapan *agile governance* pada aplikasi E-Rebon di Kabupaten Sidoarjo.

Meskipun demikian, implementasi aplikasi E-rebon masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi digital sebagian nelayan, keterbatasan jaringan internet di wilayah pesisir, dan faktor cuaca yang menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan layanan digital.

Tabel 2. Kendala Implementasi Aplikasi E-rebon

Kendala	Dampak
Literasi digital rendah	Kesulitan menggunakan aplikasi
Jaringan internet tidak stabil	Gangguan akses layanan
Faktor cuaca	Menurunkan kualitas sinyal
Kebiasaan administrasi manual	Adaptasi pengguna lambat

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *agile governance* dalam pelayanan digital pada sektor kepegawaian, perpajakan, kependudukan, dan pemerintahan daerah. Akan tetapi, penelitian mengenai penerapan *agile governance* dalam pelayanan digital sektor perikanan masih relatif terbatas. Selain itu, kajian terdahulu belum banyak menyoro ti implementasi pelayanan digital yang melibatkan masyarakat nelayan sebagai kelompok pengguna utama dengan karakteristik sosial dan lingkungan yang berbeda dibandingkan sektor pelayanan lainnya (Ainaya Alfatia, 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan *agile governance* dalam pelayanan digital sektor perikanan melalui aplikasi E-rebon yang digunakan oleh masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana faktor literasi digital, kondisi infrastruktur jaringan, dan karakteristik lingkungan pesisir memengaruhi keberhasilan implementasi pelayanan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *agile governance* dalam pelayanan digital melalui aplikasi E-rebon di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan enam prinsip *agile governance* menurut Luna, Krutchen, dan Moura (2015).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai implementasi *Agile Governance* dalam pelayanan digital melalui aplikasi E-Rebon pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Gisik Cemandi, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu wilayah pengguna layanan aplikasi E-Rebon. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap pelaksanaan pelayanan digital melalui aplikasi E-Rebon. Informan terdiri atas pihak Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, operator pelayanan, serta masyarakat nelayan sebagai pengguna layanan.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi implementasi pelayanan digital secara langsung. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi selama penggunaan aplikasi E-Rebon. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berasal dari arsip, laporan, serta dokumen terkait pelaksanaan pelayanan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi proses kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan

(*conclusion drawing*). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen penelitian.

Fokus penelitian mengacu pada enam prinsip *Agile Governance* menurut Luna, Kruchten, dan Moura (2015) yang terdiri atas: (1) *Good Enough Governance*, (2) *Business Driven*, (3) *Human Focused*, (4) *Based on Quick Wins*, (5) *Systematic and Adaptive Approach*, serta (6) *Simple Design and Continuous Refinement*.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi aplikasi E-Rebon merupakan salah satu bentuk transformasi pelayanan publik yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi nelayan. Analisis implementasi dilakukan menggunakan enam prinsip *Agile Governance* yang dikemukakan oleh Luna, Kruchten, dan Moura (2015). Pendekatan *Agile Governance* menekankan kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan, berorientasi pada kebutuhan pengguna, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

1. *Good Enough Governance*

Prinsip *Good Enough Governance* menekankan bahwa tata kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tanpa menciptakan prosedur yang berlebihan. Dalam implementasi aplikasi E-Rebon, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo berupaya menyederhanakan proses pelayanan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital.

Sebelum adanya aplikasi E-rebon, masyarakat nelayan di Desa Gisik Cemandi harus menempuh prosedur pelayanan secara manual dengan mendatangi langsung kantor dinas. Proses konvensional ini memerlukan sedikitnya 5 tahapan operasionalisasi layanan yang birokratis dan memakan waktu tunggu 3 hingga 5 hari. Selain itu, nelayan dibebani biaya transportasi yang cukup tinggi untuk mengurus surat keterangan asal ikan (SKAI) maupun rekomendasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sesudah aplikasi E-rebon diimplementasikan pada Juni 2021, terjadi simplifikasi birokrasi yang sangat signifikan. Pengurusan rekomendasi BBM dan SKAI dapat dilakukan secara online langsung tanpa melalui *smartphone* dari lokasi manapun. Tahapan operasional dipangkas dari 5 tahapan manual menjadi hanya 3 tahapan digital terintegrasi. Peralihan ini mengeliminasi biaya transportasi pengurusan (efisiensi biaya operasional nelayan Rp0,-) serta memotong waktu penyelesaian dokumen secara drastis dari hitungan hari menjadi *real-time* atau hitungan jam saja.

Penyederhanaan prosedur tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pelayanan telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna tanpa mengurangi fungsi pengawasan dan administrasi pelayanan (Suparman, 2022). Penerapan prinsip ini juga terlihat dari adanya regulasi dan mekanisme pelayanan yang tetap dijalankan sebagai dasar operasional aplikasi. Kehadiran aplikasi tidak menghilangkan fungsi pengendalian organisasi, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan Bapak Dika selaku Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan yang menyatakan bahwa: "Dalam penerapan aplikasi E-rebon, memang kita buat menyesuaikan kebutuhan nelayan agar pelayanan administrasi tidak lagi dilakukan secara manual. Melalui aplikasi ini, kita berupaya membuat sistem yang lebih sederhana dan tetap mudah dijalankan

oleh nelayan.” (Wawancara, 18 Februari 2026). Dengan demikian, implementasi E-rebon menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan telah cukup proporsional dalam mendukung pelayanan digital kepada masyarakat nelayan.

2. *Business Driven*

Prinsip *Business Driven* menekankan bahwa seluruh aktivitas organisasi harus diarahkan pada pencapaian tujuan dan kebutuhan utama pelayanan. Dalam konteks aplikasi E-Rebon, tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perikanan serta mempermudah akses layanan bagi masyarakat nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi E-Rebon dilakukan sebagai respons terhadap berbagai kendala pelayanan konvensional yang dinilai kurang efisien. Digitalisasi pelayanan memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mengurangi waktu pelayanan dan meningkatkan efektivitas kerja aparatur (Panggabean & Meilani, 2023). Orientasi terhadap kebutuhan pelayanan terlihat dari upaya Dinas Perikanan dalam menyediakan sistem yang mampu menjawab kebutuhan pengguna secara langsung. Aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor perikanan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Munir selaku nelayan pengguna aplikasi: “Kalo dari sudut pandang saya, aplikasi E-rebon ini membantu karena pengurusan subsidi BBM dan kebutuhan administrasi lainnya jadi lebih cepat diproses. Kita juga jadi bisa lebih fokus kerja melaut tanpa harus sering datang ke kantor untuk mengurus dokumen.” (Wawancara, 17 Februari 2026).

Penerapan prinsip *Business Driven* terlihat dari kesesuaian antara tujuan pengembangan aplikasi dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan E-Rebon menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi semata, melainkan diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah bagi pelayanan publik.

3. *Human Focused*

Prinsip *Human Focused* menempatkan manusia sebagai aspek utama dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi. Keberhasilan suatu pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat nelayan memahami penggunaan aplikasi E-Rebon. Pendampingan dan sosialisasi dilakukan agar pengguna mampu mengakses layanan secara mandiri.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat kendala berupa rendahnya tingkat literasi digital sebagian nelayan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua pengguna dapat memanfaatkan aplikasi secara optimal. Faktor usia, tingkat pendidikan, dan keterbatasan pengalaman menggunakan teknologi menjadi tantangan dalam implementasi pelayanan digital. Bapak Imam selaku nelayan mengungkapkan: “Beberapa nelayan yang usianya sudah lebih tua memang masih kesulitan menggunakan aplikasinya karena belum terbiasa memakai smartphone. Kadang mereka minta bantuan keluarga atau teman agar proses administrasi tetap bisa dilakukan.” (Wawancara, 13 Mei 2026). Meskipun menghadapi hambatan tersebut, instansi tetap berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi (Mario, 2023). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelola layanan tidak hanya berfokus pada sistem, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, kebutuhan, dan kemampuan adaptasi pengguna.

4. *Based On Quick Wins*

Prinsip *Based on Quick Wins* menekankan pentingnya pencapaian hasil nyata dalam waktu relatif singkat untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap suatu inovasi. Keberhasilan kecil yang dirasakan secara langsung dapat mendorong penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan organisasi (ADITYA & Achmad Kosasih, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi E-Rebon mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat nelayan. Kemudahan akses layanan, pengurangan waktu pelayanan, serta efisiensi proses administrasi menjadi bentuk keberhasilan awal yang diperoleh setelah implementasi aplikasi.

Peningkatan kemudahan pelayanan tersebut mendorong masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan sistem digital. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis, manfaat yang diperoleh pengguna menjadi faktor penting yang mendukung keberlanjutan implementasi aplikasi. Dengan adanya hasil yang dapat dirasakan secara cepat, tingkat penerimaan terhadap inovasi pelayanan menjadi lebih baik (Sri Sulastri, 2023). Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Joko selaku nelayan: "Sebelumnya kalau ada keperluan administrasi kita harus meninggalkan pekerjaan buat datang ke kantor. Sekarang melalui aplikasi, pengurusan bisa dilakukan lebih cepat jadi pekerjaan sebagai nelayan itu nggak terganggu." (Wawancara, 17 Februari 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *Based on Quick Wins* telah diterapkan melalui penyediaan manfaat konkret yang langsung dirasakan oleh pengguna layanan.

5. *Systematic and Adaptive Approach*

Prinsip *Systematic and Adaptive Approach* menekankan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna secara berkelanjutan. Organisasi dituntut untuk memiliki mekanisme yang sistematis sekaligus fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola aplikasi E-Rebon terus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan yang berkembang. Evaluasi dan perbaikan dilakukan untuk memastikan aplikasi tetap mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat nelayan.

Meskipun demikian, implementasi aplikasi masih menghadapi berbagai tantangan eksternal. Salah satu kendala utama adalah kondisi jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah pesisir. Selain itu, faktor cuaca juga memengaruhi aktivitas masyarakat nelayan dalam mengakses layanan digital (Koswara et al., 2024). Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, Dinas Perikanan melakukan berbagai upaya penyesuaian melalui pendampingan pengguna serta penyempurnaan sistem pelayanan. Ibu Okky selaku pegawai Dinas Perikanan menyampaikan: "Kami juga menerima masukan dari nelayan terkait kendala penggunaan aplikasi. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di lapangan." (Wawancara, 13 Mei 2026). Langkah tersebut menunjukkan adanya kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan pelayanan sehingga implementasi aplikasi dapat terus berjalan..

6. *Simple Design and Continuous Refinement*

Prinsip *Simple Design and Continuous Refinement* menekankan pentingnya desain sistem yang sederhana serta penyempurnaan secara berkelanjutan. Sistem yang mudah digunakan akan meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus mempercepat proses adaptasi terhadap teknologi baru. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi E-Rebon dirancang

untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi perikanan. Tampilan dan mekanisme pelayanan dibuat lebih sederhana dibandingkan prosedur manual yang sebelumnya digunakan.

Selain menghadirkan desain yang relatif mudah dipahami, pengelola aplikasi juga melakukan penyempurnaan sistem secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna dan hasil evaluasi implementasi. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengatasi berbagai kendala yang muncul selama penggunaan aplikasi.

Penyempurnaan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi aplikasi terhadap kebutuhan masyarakat. Bapak Imam selaku nelayan mengungkapkan pengalamannya: "Kalau menurut saya perubahan paling terasa itu proses pelayanan menjadi lebih praktis. Informasi yang dibutuhkan lebih cepat diperoleh dan pengurusan administrasi tidak selama sebelumnya." (Wawancara, 13 Mei 2026). Dengan adanya evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, pelayanan digital melalui aplikasi E-Rebon memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat nelayan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *agile governance* pada pelayanan digital melalui aplikasi E-Rebon di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik. Berdasarkan enam prinsip *agile governance* yang digunakan sebagai fokus penelitian, aplikasi E-Rebon mampu mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi nelayan. Digitalisasi pelayanan memberikan kemudahan akses, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap prosedur pelayanan konvensional yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Pada aspek *Good Enough Governance*, tata kelola pelayanan telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pengguna tanpa menghilangkan fungsi pengawasan pelayanan. Pada prinsip *Business Driven*, pengembangan aplikasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat nelayan sehingga menghasilkan nilai tambah bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, prinsip *Human Focused* terlihat melalui upaya pendampingan dan sosialisasi kepada pengguna, meskipun masih ditemukan kendala berupa rendahnya literasi digital sebagian nelayan.

Penerapan prinsip *Based on Quick Wins* tercermin dari manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat berupa kemudahan dan percepatan pelayanan. Pada prinsip *Systematic and Adaptive Approach*, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap berbagai tantangan implementasi, termasuk kendala jaringan internet dan kondisi lingkungan pesisir. Sementara itu, prinsip *Simple Design and Continuous Refinement* diwujudkan melalui penyederhanaan sistem pelayanan serta upaya penyempurnaan aplikasi secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan pengguna.

Meskipun implementasi *Agile Governance* melalui aplikasi E-Rebon telah memberikan hasil yang positif, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait penguatan literasi digital masyarakat nelayan dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang lebih intensif kepada pengguna, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi sistem secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi pelayanan digital sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo.

Referensi

- ADITYA, T. A., & Achmad Kosasih. (2024). Digital Leadership dalam Digital Governance untuk Pelayanan Publik Digital di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 639–652. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3209>
- Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM Dalam Menghadapi Digitalisasi. *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 16, 33.
- Ainaya Alfatia, R. F. (2025). *PRINSIP AGILE GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN DIGITAL*. 11(2), 299–306.
- Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi kebijakan dan tindakan pemerintah , sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik*. 2(4).
- Eprilianto, D. F., Megawati, S., Pradana, G. W., Eka, Y., Sari, K., Hibatulloh, M. H., Sari, L. A., Rizal, M., Sheren, A. V., & Surabaya, U. N. (2025). *Digitalisasi Administrasi dan Penguatan Literasi Digital sebagai Katalisator Pelayanan Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan di Desa Beluk Kenek Kabupaten Sumenep Digitalizing Administration and Enhancing Digital Literacy for Innovative and Sustainable P*.
- Koswara, A., Manajemen, M., Ekonomi, F., Indonesia, U. K., Tinggi, K. P., & Jatinangor, J. R. (2024). *Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan : Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia*. 05.
- Mario, E. (2023). *Sosialisasi Pengembangan Budaya Literasi Digital Di Kalangan Remaja Kampung Nelayan Kota Makassar*. 01(01), 47–52.
- Panggabean, C., & Meilani, N. L. (2023). *Digitalisasi Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Aplikasi Pekanbaru Dalam Genggaman Dalam Tinjauan Digital Era Governance*. 2(3), 721–728.
- Rahmadany, A. F. (2024). *Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4 . 0*. 14(2), 195–209.
- Sri Sulastri, A. P. (2023). *Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. 9(2), 187–203. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.4>

Zahra, Nurul Siti Ambia, Suparman, A. (2022). *Penerapan Prinsip Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung*. 3(5), 6167–6178.